

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA**

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dikeluarkan untuk menjadi pedoman bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tata kelola administrasi kantor dan pelayanan pendaftaran kehendak nikah. Dalam prakteknya, implementasi hukum tidak dapat dijalankan seutuhnya oleh KUA Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative melalui sumber data kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diterapkan optimal pada tahapan sampai pelaporan pencatatan pernikahan, diterapkan namun tidak maksimal dalam penyimpanan dokumen dan tidak di terapkan pada pemberian buku nikah dan publikasi informasi. ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: *Petama, Idealize Policy* hukum itu sendiri sebagai pedoman bagi pencatatan pernikahan dengan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi SIMKAH berbasis web. Implementor sebagai pelaksana implementasi yang memiliki kendala dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. faktor lingkungan yang mempengaruhi media transformasi digital. Kemudian target group yang merupakan kelompok masyarakat konservatif. Terakhir Sarana dan Prasarana yang belum disesuaikan dengan tujuan kebijakan.

Saran penulis bahwa dalam Formulasi kebijakan perlu disusun kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana yang menyesuaikan dengan tujuan peraturan sebelum aturan di implementasikan. Perlunya ada riset dan kajian terlebih dahulu dalam penerepan peraturan teknis supaya peraturan dapat di implementasikan dengan baik oleh para implementor. Perubahan mekanisme peraturan berbasis digital atau Web perlu adanya persiapan yang matang mulai dari server, sub bagian yang fokus mengelola sistem informasi, fitur-fitur yang dibutuhkan. Perlunya koordinasi secara masif dengan lembaga atau instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dalam integrasi data kependudukan. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan khusus tentang pegawai Kantor Urusan Agama ditingkat Kecamatan jangan sampai ada pegawai yang rangkap jabatan atau masih berstatus sebagai honorer.

Kata Kunci : Implementasi hukum, Pencatatan Pernikahan, KUA

## **SUMMARY**

*This thesis research is entitled Implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in Cineam District, Tasikmalaya Regency. Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration was issued to serve as a guideline for the District Religious Affairs Office in carrying out office administration and marriage registration services. In practice, the implementation of the law cannot be carried out completely by the District KUA. This research uses normative juridical research methods through library data sources and field research. The research results showed that implementation was applied optimally at the stage up to the reporting of marriage registration, was implemented but not optimally in document storage and was not applied to providing marriage books and publishing information. There are several influencing factors, including: First, idealize the legal policy itself as a guide for registering marriages more effectively and efficiently using web-based SIMKAH technology. Implementors as implementers have constraints in terms of quantity and quality of human resources. environmental factors that influence digital transformation media. Then the target group is a conservative community group. Lastly, Facilities and Infrastructure have not been adjusted to policy objectives.*

*Keywords: Law implementation, Marriage Registration, KUA*